

BAB V

Kesimpulan

Sejak pemerintahan junta militer berkuasa banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar antara lain adalah penindasan terhadap suku-suku minoritas, kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, dan terjadinya kekerasan demonstran dalam demonstrasi tahun 1988. Selain itu hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintahan junta militer yang tidak harmonis mengakibatkan berbagai keterpurukan yang dirasakan oleh rakyat Myanmar sehingga mendorong rakyat Myanmar melakukan pemberontakan terhadap rezim pemerintah yang berkuasa. Akan tetapi, desakan dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil selama ini tidak terlalu memberikan perubahan yang maksimal terhadap kondisi negara dan semakin banyaknya korban dalam proses demokrasi menyebabkan timbulnya reaksi dari pihak internasional seperti negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

Peringatan atas tindakan junta militer itupun dilakukan oleh organisasi internasional, ASEAN dan PBB. Selain dari negara-negara penganut demokrasi tersebut, pelanggaran HAM dan pemerintahan yang tidak demokratis di Myanmar, membuat Myanmar mendapat perhatian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional yang mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap demokrasi dan perlindungan hak sipil, salah

Myanmar membuat OSF melaksanakan program-program yang menunjang dan memfasilitasi terjadinya konsolidasi demokrasi yang lebih baik di Myanmar.

Dalam upaya membangun demokrasi dan masyarakat sipil yang terbuka, Open Society Foundations sebagai sebuah gerakan sosial Global Civil Society Versi Neo liberal berupaya melakukan berbagai kegiatan dan program-program yang menunjang keberhasilan akan terciptanya konsolidasi demokrasi dan masyarakat sipil tersebut. Global Civil Society versi neo liberal merupakan salah satu kategorisasi Global Civil Society menurut Mari Kaldor, dalam versi ini gerakan sosial OSF di pandang sebagai sebuah gerakan sosial yang bersifat dilembagakan dan menghendaki proses terciptanya masyarakat sipil yang semakin kuat dan berkembang serta menunjang terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih baik versi masyarakat barat.

OSF telah melakukan peran yang efektif dan berpengaruh dalam pengembangan demokrasi dan rekonsiliasi masyarakat sipil di Myanmar. Kontribusi OSF dalam proses demokratisasi di Myanmar diwujudkan dalam berbagai kerjasama dengan jaringan Yayasan Soros yang tersebar di seluruh dunia. Kerjasama tersebut meliputi berbagai program-program maupun

OSF telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa organisasi regional di Asia Tenggara salah satunya di Indonesia. Pasca kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, jaringan Soros mendanai dua lembaga non pemerintah (NGO), yaitu Tifa Foundation dan International Transperancy. Tifa Foundations telah memberikan dampak yang signifikan dalam proses perkembangan demokrasi di Myanmar, organisasi yang merupakan salah satu bagian dari jaringan Yayasan Soros ini telah melakukan program kemitraan dengan Altsean Burma yang diprakarsai oleh ketua Tifa Foundations Yuli Ismartono, yang juga merupakan dewan penasehat Altsean Burma. Organisasi yang didirikan di Thailand ini juga berupaya untuk membangun kemitraan di seluruh kawasan Asia Pasifik, dalam menyusun dan menjalankan sebuah strategi bersama untuk memobilisasi sebuah gerakan masyarakat sipil yang terkoordinasi bagi Myanmar, serta untuk memperkuat dukungan masyarakat sipil dari *ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC, Kaukus Antarparlemen ASEAN untuk Myanmar) dan kaukus-kaukus parlemen untuk Burma di tingkat nasional.

Di Amerika OSF juga menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok organisasi dan asosiasi, salah satunya dengan Mario Einaudi Center for International Studies, yaitu sebuah lembaga pemerhati pendidikan dunia yang berbasis di Universitas Cornell, New York. Kerjasama ini terjalin dalam bentuk program Southeast Asia Program (SEAP), program ini terbentuk karena banyaknya permintaan untuk akses informasi dan pelatihan tentang Myanmar dan kelompok-kelompok etnis di negara tersebut.

Komitmen program ini adalah untuk menyediakan sumber daya pendidikan di Myanmar khususnya bagi etnis terpinggirkan melalui perpustakaan dan organisasi-organisasi masyarakat. Selain itu program ini juga menawarkan lokakarya pengembangan profesionalitas guru dan presentasi untuk kelompok komunitas dan pengusaha yang berfokus pada latar belakang budaya dan sejarah Myanmar.

Dalam Program *Burma Project/Southeast Asia Initiative*, OSF menempatkan prioritas utama dalam inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dengan Association of Southeast Asian Nations, khususnya dalam pengembangan perlindungan hak asasi manusi di Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Selain itu *Burma Project/Southeast Asia Initiative* juga melakukan berbagai kegiatan seminar berskala internasional dan event-event diskusi yang membahas tentang permasalahan demokrasi di Myanmar. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain seminar-seminar internasional yang mengambil berbagai macam pembahasan tentang permasalahan demokrasi di Myanmar.

Program *Documentary Photography Project* mendukung fotografi sebagai media mobilisasi massa dalam isu keadilan dan hak asasi manusia. Sejak tahun 1998, *Documentary Photography Project* telah memberikan dana hibah dan melaksanakan pameran foto internasional yang dihadiri lebih dari 300 *fotografer* yang meneliti isu tentang masyarakat terbuka.

mekanisme untuk mendorong keterlibatan sipil, kesadaran masyarakat dan perhatian media.

Berdasarkan atas upaya tersebut maka di adakan pameran karya seni yang mempunyai tema *The "Blood Rubies" of Burma*. Pameran yang dilaksanakan di Museum Field, Chicago ini mengeksplorasi perbedaan antara hak asasi manusia dan perdagangan permata di Myanmar secara global. Di Negara Myanmar potret mengenai kasus demokrasi dan keadilan hukum juga di dokumentasikan melalui gambar tokoh-tokoh nasional Myanmar seperti Aung San Suu Kyi dan beberapa orang mantan tahanan negara. Konsep Fotography "*Even Though I'm Free, I Am Not*" mendokumentasikan potret pembangkang politik dari Myanmar yang berpose dengan nama-nama tahanan politik yang ditulis pada telapak tangan mereka. Konsep ini merupakan bentuk protes tentang kondisi hukum dan keadilan di Myanmar sangat tidak memihak rakyat.

Solidaritas para tahanan politik ini merupakan potret nyata kasus politik dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil di Myanmar. Tindakan pemerintahan junta militer yang sangat tidak demokratis tersebut telah memicu para tahanan politik ini untuk menyuarakan keadilan. Seri dokumentasi foto ini merupakan bagian dari pameran Moving Walls 19. Moving Walls 19 adalah sebuah dokumentasi tahunan tentang pameran fotografi yang membahas tentang keadilan sosial dan isu- isu hak asasi manusia oleh Open Society Foundations di New York dan Washington, D.C.

Semua kegiatan dan program OSF tersebut terbukti telah memberikan banyak perubahan-perubahan positif terhadap proses demokrasi di Myanmar, mulai dari keterbukaan diri Myanmar terhadap kunjungan asing, pembebasan tahanan politik termasuk pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, pelonggaran kontrol terhadap media, serta penandatanganan perjanjian gencatan senjata dengan kelompok pemberontak. Selain itu juga, terdapat hal baru dalam transisi politik Myanmar yakni kemenangan besar partai National League For Democracy (NLD) pada pemilu sela yang diadakan bulan Maret 2012 sebagai kemajuan besar yang akan membawa Myanmar ke era kebebasan yang telah lama diharapkan.